



Analisis Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2024

Wawan Patriansyah¹; Nursiah Hasibuan²; Muallim Hasibuan³; Tri Eva Juniasih⁴
Universitas Graha Nusantara

Corresponding author : wawanfatriansyah@gmail.com

Abstract. Elections are a means to determine the fate of the nation for the next five years. For this reason, it is necessary to provide understanding through political education to the public, especially students who are classified as beginner voters with the aim of building student participation to participate in elections. As educators who have an important role in providing education in the field of politics to students, this research will analyze the role of political education in building student participation in elections. The aim of this research is to find out the role of political education in increasing student participation in the 2024 elections. The method used in this research is descriptive qualitative. The respondents or samples for this research were 120 FISIPOL UGN students. Based on the research results, it was concluded that students' understanding and knowledge of elections is still lacking due to the lack of political education provided. Student participation in taking part in the upcoming elections is in the good category, but still needs improvement because students' awareness of election participation is still limited to exercising their right to vote. Good education and students' low political attitudes will influence students' mindsets about things that can be followed in the implementation of elections.

Keywords: Role, Political Education, Participation, Elections.

Abstrak. Pemilu merupakan sarana untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Untuk itu perlu adanya pemahaman melalui pendidikan politik kepada masyarakat khususnya mahasiswa yang tergolong pemilih pemula dengan tujuan membangun partisipasi mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sebagai tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan di bidang politik kepada mahasiswa, maka dalam penelitian ini akan dianalisis peran pendidikan politik dalam membangun partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan politik terhadap peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pemilu 2024. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalitatif deskriptif. Yang menjadi responden atau sampel penelitian ini adalah mahasiswa FISIPOL UGN dengan jumlah 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap pemilu masih kurang disebabkan kurangnya pendidikan politik yang diberikan. Partisipasi mahasiswa dalam mengikuti pemilu mendatang sudah dalam kategori baik, namun masih perlu peningkatan karena kesadaran mahasiswa terhadap partisipasi pemilu masih sebatas penggunaan hak pilihnya. Pendidikan yang cukup baik dan rendahnya sikap politik mahasiswa akan mempengaruhi pola pikir mahasiswa tentang hal-hal yang dapat diikuti dalam pelaksanaan pemilu.

Kata kunci: Peran, Pendidikan Politik, Partisipasi, Pemilu.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan Umum (Pemilu) dimana setiap masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas memiliki hak dalam kegiatan pemilu tersebut. Masyarakat yang telah memiliki hak suara berhak melakukan pemilihan terhadap wakil-wakil yang diinginkan mulai dari DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun sehingga lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dimana lembaga

tersebut sudah harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaannya dari jauh-jauh hari bahkan 1 tahun sebelum pemilu berlangsung. Penyelenggara pemilu 2024 selalu berusaha melakukan persiapan yang terbaik agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga terwujud pemilu yang berasaskan luber jurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil). Terwujudnya sistem demokrasi sesuai dengan UUD 1945 dapat dilihat dari keberlangsungan pemilu yang luber dan jurdil (Rosi, 2018).

Untuk mewujudkan sistem demokrasi sesuai asas luber jurdil, dibutuhkan partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat di Negara Demokrasi sangat penting karena perlu dipahami bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan rakyat sebagai kunci negara disebut berdaulat. Pengambilan keputusan politik harus melibatkan masyarakat agar setiap kebijakan yang akan dihasilkan benar-benar untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman untuk melaksanakan pemilu termasuk pemahaman untuk kelancaran pemilu melalui adanya pendidikan politik terutama pemahaman kepada pemilih pemula yang belum pernah sama sekali ikut dalam pesta demokrasi Indonesia. Banyak pemilih pemula pada tahun 2019 yang lalu belum berpengalaman dan terkendala dalam pemilihan sehingga banyak hak suara yang tidak digunakan karena pemahaman pemilih pemula terhadap pentingnya memberikan hak suaranya di TPS masih rendah (Fahrudin, 2018). Pemahaman tentang pelaksanaan pemilu akan berdampak negatif dimana pemilih pemula masih mudah dipengaruhi, dimobilisasi, dan dipaksakan untuk memilih seseorang (Putra, 2018).

Pada dasarnya, pendidikan politik merupakan pendidikan bagi Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagaimana seharusnya berbangsa dan bernegara yang benar dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk berperan aktif dalam Pembangunan termasuk dalam Pembangunan politik pada khususnya mengikuti pemilihan umum. Selain itu, pendidikan politik juga akan mempengaruhi kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik sesuai dengan budaya dan demokrasi Indonesia dengan berasaskan nilai-nilai Pancasila (Rahman dan Suharno, 2020). Sistem demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang di inginkan oleh masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan sebagai pelaksanaannya adalah partai politik yang aktif berpartisipasi secara kreatif melakukan tugas dan fungsinya menjalankan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaannya adalah sistem Demokrasi Pancasila dan partai politik untuk mewujudkan kepentingan bangsa dan negara (Pasaribu, 2017). Partai politik menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu karena yang menjadi pelaku utama pemilu adalah partai-partai politik yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Politik tersebut merupakan praktek kekuasaan dan

kaitannya dengan pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan-keputusan otoritatif (Prayogo dan Wardhani, 2022).

Hingga sekarang, peran dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan khususnya pemilih pemula belum dirasakan secara maksimal. Sosialisasi mengenai pentingnya masih jarang dilakukan oleh partai politik sehingga berdampak pada kekurangtahuan para pemilih dalam memberikan hak suaranya serta masih mudah terprovokasi dalam menyikapi demokrasi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga akan berdampak pada konflik massif dimana stabilitas keamanan bermasyarakat dan bernegara akan terganggu dan dapat menghancurkan bangsa Indonesia serta cita-cita pemilu yang *luber dan jurdil* tidak terwujud (Nurdiansyah, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu maka perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi yang berisi tentang peran dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagai manusia atau warga negara secara sadar dan peran dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagai manusia atau warga negara (Nurdin, 2019).

Pemberian pendidikan politik harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Pendidikan politik diberikan kepada para pemilih pemula khususnya mahasiswa Universitas Graha Nusantara yang diharapkan dapat memahami pentingnya memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemilu serta untuk menentukan pemimpin negara Indonesia. Mahasiswa yang merupakan agen-agen perubahan sangat mudah dimobilisasi politik dan sehingga perlu diberikan pendidikan politik. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian tentang Analisis Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan politik yang diberikan oleh para dosen kepada mahasiswa dalam membangun kesadaran mahasiswa berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024.

KAJIAN TEORITIS

Peran merupakan kata yang sering digunakan dalam mendukung sebuah kalimat yang mengaung tokoh atau orang dengan tujuan tertentu agar arti yang diharapkan dapat tersampaikan. Adanya peran berarti seseorang melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu kedudukan atau jabatan tertentu dimana tindakannya dapat berimplikasi bagi masyarakat luas (Siagian, 2012). Peranan dapat diartikan sebagai status atau kedudukan dimana dalam kedudukan tersebut dilaksanakan hak dan kewajibannya terutama dalam meningkatkan ilmu

pengetahuan masyarakat sesuai dengan konsep-konsep peran seperti persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran yang ditimbulkan (Soekanto, 2012). Berdasarkan pengertian peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang diberikan oleh seseorang dengan kedudukan tertentu dengan harapan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dalam penelitian ini adalah dampak dari pendidikan politik membangun kesadaran mahasiswa berpartisipasi dalam pemilu.

Pendidikan politik adalah salah satu proses pembelajaran yang dilakukan untuk memahami nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang berlaku agar setiap warga negara dapat menyikapi dan berorientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat dan negara Indonesia (Halking, 2016). Untuk menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien, perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia harus terjadi dan dapat diperoleh dengan adanya pendidikan politik (Hermawan, 2020). Pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan Masyarakat yang peduli dengan politik serta memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi, pengetahuan tentang struktur politik, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan politik dapat diartikan sebagai sarana yang sangat penting dilakukan bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kemampuan warga negara Indonesia dalam mewujudkan negara demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu.

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan seluruh warga negara Indonesia untuk menentukan kedaulatan rakyat dan mengupayakan terwujudnya demokrasi di Indonesia (Harianja dkk, 2023). Partisipasi politik adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memberi perhatian terhadap pemerintahan dengan berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan rakyat (Kevin R. Hardwick dalam (Rohaniah dan Efriza, 2015). Berdasarkan hal tersebut, partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak secara sengaja oleh warga negara mengenai kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintahan. Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud yaitu keiktsertaan warga negara Indonesia dalam menjalankan kedaulatan rakyat dengan memberikan hak suaranya untuk pemimpin Indonesia dan perwakilan di pemerintahan mewujudkan cita-cita bangsa.

Pemilihan umum merupakan kegiatan demokrasi yang dilakukan warga negara Indonesia dalam rangka menjalankan suatu pemerintahan yang berada pada tangan rakyat dan bertindak pada rakyat, artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dengan tujuan melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017). Pemilihan umum adalah alat atau sarana untuk menginterpretasikan kehendak warga negara Indonesia sebagai pemilih wakil-wakilnya duduk menjadi perwakilan pemerintahan (Refly Harun, 2018). Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Pemilu dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin memperoleh data secara narasi deskriptif pada suatu lembaga atau organisasi masyarakat dan dalam hal ini mahasiswa, yaitu tentang pendidikan politik dalam membangun partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Teknik pengambilan responden yaitu dengan model pengambilan sampel secara purposive untuk mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang akurat. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIPOL UGN semester 1, 3, 5, dan 7 yang berjumlah 120 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dalam bentuk kuisioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang didapatkan dari informan melalui wawancara, maka data tersebut dilakukan analisis data bersifat induktif / kualitatif dari hasil temuan yang dilakukan pembahasan yang menekankan makna dari pada generalisasi (Lenaini, 2021). Untuk teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman, meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah masyarakat yang merupakan golput di Indonesia masih tinggi. Hal ini harus segera diatasi agar dapat meningkatkan partisipasi dalam mengikuti pemilu. Salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya mahasiswa yaitu dengan memberikan pendidikan politik. Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

observasi kepada mahasiswa yang merupakan target penelitian, tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal tentang partisipasi politik dan keinginan untuk berpartisipasi pada pemilu di tahun 2024. Data hasil observasi kepada mahasiswa tentang mahasiswa yang termasuk pemilih pemula dan sudah pernah ikut dalam pemilu ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Data Mahasiswa

No	Kategori	Jumlah Mahasiswa	Persentase (%)
1	Pemilih Pemula	98	80
2	Pernah Pemilu	22	20
Total		120	100

Dari data di atas diketahui bahwa mahasiswa yang tergolong dalam pemilih pemula sebanyak 96 orang atau sebesar 80% dan yang sudah pernah mengikuti pemilu sebanyak 22 orang atau 20%. Hal ini diartikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap pemilu masih kurang karena pengalaman yang belum ada dalam mengikuti pemilu.

Untuk melihat partisipasi mahasiswa dalam pemilu mendatang, diberikan kuisioner tentang pengetahuan responden terhadap pemilu 2024. Adapun hasil observasi yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Persentase Pengetahuan Mahasiswa tentang Pemilu

No	Aspek Pengetahuan Pemilu	Jumlah, Persentase (%) Mahasiswa, dan Kriteria Penilaian					
		Baik		Cukup		Tidak Baik	
		n	%	n	%	n	%
1	Pengetahuan politik mahasiswa tentang pemilu	33	27,5	75	62,5	12	10
2	Sikap politik mahasiswa	36	30	66	55	18	15
3	Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warganegara dalam pemilu	57	47,5	54	45	9	7,5
4	Pendidikan politik	18	15	64	53,33	38	31,67
5	Intensitas mahasiswa mengikuti informasi pemilu	44	36,67	55	45,83	21	17,5
Total		188	156,67	314	261,66	98	81,67
Rata-Rata		37,6	31,34	62,8	52,33	19,6	16,34

Berdasarkan tabel 2. di atas, pengetahuan politik mahasiswa tentang pemilu menunjukkan cukup baik yaitu persentase sebesar 75%, dan baik sebesar 33%. Namun masih ada yang tidak memahami pemilu yaitu sebesar 10%. Sikap politik mahasiswa dalam kategori baik sebesar 30%, cukup baik sebesar 55%, dan tidak baik sebesar 15%. Pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban warganegara dalam pemilu dalam kategori baik sebesar 47,5%, kategori cukup baik sebesar 45%, dan tidak baik sebesar 7,5%. Pendidikan politik yang pernah diterima oleh mahasiswa sebesar 15% dalam keadaan baik, 53,55%

dalam kategori cukup baik, dan sebesar 31,67% mahasiswa tidak pernah mengikuti pendidikan politik. Intensitas mahasiswa mengikuti informasi pemilu sebesar 36,67% baik, sebesar 45,83% cukup baik, dan 17,5% tidak baik. Secara keseluruhan, pengetahuan mahasiswa tentang pemilu melalui pendidikan politik sebesar 31,34% dalam kategori baik, 52,33% dalam kategori cukup baik, dan sebesar 16,34% dalam kategori tidak baik. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang pemilu melalui pendidikan politik masih dalam kategori cukup baik hal ini karena pendidikan politik yang diterima mahasiswa hanya bersumber dari media sosial dan berita-berita dari televisi.

Pengetahuan mahasiswa tentang pemilu melalui pendidikan politik maupun sosialisasi politik diharapkan mampu membangun dan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilu. Berikut ini adalah persentase partisipasi mahasiswa mengikuti pemilu tahun 2024.

Tabel 3.
Persentase Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilu

No	Aspek Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilu	Jumlah, Persentase (%) Mahasiswa, dan Kriteria Penilaian					
		Baik		Cukup		Tidak Baik	
		n	%	n	%	n	%
1	Kondisi psikologis	68	56,67	48	40	4	3,33
2	Kesediaan menjadi PPS, KPPS, ataupun PTPS dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilu	69	57,5	43	35,83	8	6,67
3	Keikutsertaan dalam kampanye	21	17,5	45	37,5	54	45
4	Menggunakan hak pilih	89	74,17	24	20	7	5,83
5	Mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara	32	26,67	64	53,33	24	20
Total		279	232,5	224	186,67	97	80,83
Rata-Rata		55,8	46,5	44,8	37,33	19,4	16,17

Tabel 3 di atas menunjukkan partisipasi mahasiswa dalam pemilu yang dilihat dari aspek keadaan atau kondisi psikologis mahasiswa dengan persentase sebesar 56,67% dalam keadaan baik, 40% dalam keadaan cukup baik, dan sebesar 3,33% tidak baik. Hal ini menunjukan rata-rata mahasiswa mampu secara fisik dan mental untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ditinjau dari kesediaan mahasiswa menjadi anggota PPS, KPPS, ataupun PTPS dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilu diperoleh dalam kategori baik sebesar 57,5%, dalam kategori cukup baik sebesar 35,83%, dan 6,67% dalam kategori tidak baik. Dari aspek tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa bersedia dan tertarik untuk menjadi panitia dalam penyelenggaraan pemilu. Mahasiswa yang ikut serta dalam kampanye diperoleh sebesar 17,5% dalam kategori baik, sebesar 37,5% cukup baik, dan sebesar 45% tidak baik. Dengan

demikian, mahasiswa yang mengikuti kampanye masih rendah sehingga dapat banyak calon legislatif yang dikenal dan bingung untuk memilih siapa yang terbaik menjadi perwakilan rakyat.

Mahasiswa yang akan menggunakan hak pilihnya diperoleh sebesar 74,17% dalam kategori baik, 20% dalam keadaan cukup baik, dan sebesar 5,83% tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang, namun 5,83% menyatakan tidak karena alasan akan pulang kampung dan membutuhkan biaya. Mahasiswa mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh 26,67% dalam kategori baik, 53,33% dalam kategori cukup baik, dan sebesar 20% dalam kategori tidak baik. Dalam hal ini, mahasiswa cukup tertarik dan memiliki antisipasi yang cukup dalam mengikuti penghitungan suara nantinya. Secara keseluruhan, ditinjau dari seluruh aspek, partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pemilu diperoleh sebesar 46,5% dalam kategori baik, sebesar 37,33% dalam kategori cukup baik, dan 16,17% dalam kategori tidak baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilu sudah baik namun untuk pengetahuan masih cukup dan tergolong masih kurang karena pengalaman yang belum pernah dilakukan. Berdasarkan data-data di atas, mahasiswa merasa bahwa partisipasi dalam pemilu hanya sebatas menggunakan hak pilihnya dan tidak fokus pada pengenalan calon-calon legislative bahkan presiden untuk 5 tahun mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis penelitian di atas, yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik yang diterima oleh mahasiswa masih jarang dan hanya sebatas dari media sosial atau televisi, sehingga pengetahuan mahasiswa terhadap pemilu masih kurang karena masih dalam kategori cukup baik.
2. Tingkat partisipasi mahasiswa untuk mengikuti pemilu mayoritas sudah baik, namun masih perlu peningkatan dimana mahasiswa hanya terfokus pada penggunaan hak pilihnya tanpa memperdulikan calon-calon pelihannya.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, mahasiswa masih kurang peduli terhadap pelaksanaan pemilu karena saat ini dianggap masih banyak pemimpin yang melakukan KKN dan calon-calon legislatif yang akan bersaing banyak menggunakan politik uang.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Selain perguruan tinggi, peran penyelenggara pemilu seperti KPU, partai politik, Bawaslu, dan lembaga pemerintahan lainnya aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa sangat penting karena mahasiswa menjadi calon-calon penerus bangsa yang menajdi ujung tombak pembangunan negara.
2. Untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jujur, diharapkan semua pihak menggunakan hak suaranya agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat menyampaikan gagasan-gagasan untuk kepentingan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Efriza, dan Yoyoh Rohaniah, (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intans Publishing.
- Fahrudin, A. (2018). *Menyelamatkan Pemilih Pemula*. (online), <https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula> diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- Halking. (2016). *Simulasi Praktik Model Pendidikan Politik Sebagai Salah Satu Formatif Mata Kuliah Peididikan Politik di Jurusan PPKN FIS UNIMED*. Makalah ini disajikan dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-I, di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Harianja, N, dkk. (2023). Edukasi pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam pemilihan Umum Mendatang Di SMK Negeri 2 Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, COVIT (Community Service of Tambusai)*, 3(1), 46-53.
- Harun, R. (2018). *Papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”*. Disampaikan dalam seminar nasional dan call for Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo.
- Hermawan, I.C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 10(1), 1-19.
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengambilan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.
- Prayogo, D.V, & Wardhani, N.W. (2022). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 25–30.

- Putra, P.M.S. (2018). KPAI: Pendidikan Politik Pemilih Pemula Masih Minim. (online), (<https://www.liputan6.com/pileg/read/3672219/kpai-pendidikan-politik-pemilih-pemula-masih-minim>) diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(1), 54–58.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Rosi, B. (2018). *Pemilu Adalah Kita*. (online), (<https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita>) diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- Siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.